DINAMIKA SOSIAL POLITIK DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DI MALUKU UTARA

SOCIAL POLITIC DYNAMICS AND THE FUTURE OF DEMOCRACY IN NORTH MALUKU

Kamaruddin Salim
Universitas Nasional
kcommandante@gmail.com

ABSTRAK

Dinamika sosial politik di Maluku Utara memberikan catatan menarik dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Dalam kontestasi politik seiring dengan bergulirnya Pilkada Langsung. Peranan aktor politik mencuat sebagai kelompok *civil society* yang mampu mempengaruhi kebijakan birokrasi atau terlibat dalam menentukan siapa yang layak duduk di pemerintahan. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan landasan teori demokrasi Schumpeter, teori politik identitas Castells, Budaya Politik Gabriel dan Almond serta Toleransi, terlihat dengan jelas telah terjadi pelemahan pada politik identitas etnis dan peranan partai politik. Kenyatan ini terbukti di bidang sosial, dengan terpilihnya etnis lain di luar Maluku Utara sebagai Kepala Daerah telah memberikan gambaran bahwa masa depan demokrasi tentunya menjadi pembelajaran terpenting bagi bangsa Indonesia dalam bertoleransi dan berpolitik.

Kata Kunci: Demokrasi, Politik Identitas Etnis, Budaya Politik, PILKADA dan Toleransi

ABSTRACT

The social political dynamics in North Maluku provide an interesting record in the history of politics in Indonesia. In political contestation along with the election of direct. The role of political actors is emerging as a civil society group capable of influencing bureaucratic policies or being involved in determining who is eligible to sit in government. Using analytical descriptive methods and the foundations of Schumpeter's theory of democracy, Castells political theory of identity, Gabriel and Almond Political Culture and Tolerance, it is clear that there has been a weakening in the politics of identity and the role of political parties. This fact is evident in the social field, with the election in North Maluku as the Head of Region has given the dimension of the future to become a nation of Indonesia in tolerating and politicking.

***Keywords**: Democracy, Political Identity Ethnicity, Political Culture, ELECTION and Tolerance*

PENDAHULUAN

Dinamika sosial dan politik di Maluku Utara mengalami perubahan yang sinifikan paska ditetapkannya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Pemerintah Pusat. Walau melalui suatu proses politik yang terbilang panjang dan menegangkan, akhirnya, Maluku Utara yang baru dimekarkan pada 1999, menjadi satu daerah yang terpisah dari Provinsi Maluku. Proses politik yang dilakukan terasa menegangkan karena bersamaan dengan terjadinya konflik horizontal di Ambon. Akhirnya, lewat referendum terlihat gambaran bahwa seluruh masyarakat Maluku Utara berkeinginan terpisah dari Provinsi Maluku dan membentuk Provinsi sendiri, yang kini bernama Provinsi Maluku Utara.

Maluku Utara sebagai daerah yang secara administrasi terpisah dari Provinsi Maluku, Secara politik, dalam pelaksanaan kontestasi politik sebagai proses demokrasi, kenyataan tersebut menghadirkan ruang baru bagi para elit politik dan elit birokrasi serta masyarakat *civil society* untuk terlibat aktif di dalamnya. Keterlibatan elit politik dan elit birokrasi dalam kontestasi politik yang sejak pemekaran Provinsi Maluku Utara telah memberikan suatu dinamika yang terbilang bertensi tinggi dan sarat dengan konflik serta intrik. Selaras dengan itu, hingga kini, konflik berdarah pada 1999-2000 juga turut memberikan beban sejarah bagi masyarakat Maluku Utara.

Kontestasi politik sejatinya merupakan salahsatu bagian penting dari proses politik yang dilakukan secara legal degan melalui tahapan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara demokrasi. Apalagi, secara harfiah kontestasi mengandung arti pertarungan atau perlombaan politik untuk mencapai cita-cita atau harapan yang terencana melalui sistem partai politik. Tidak ada yang bisa menepis, kontestasi politik di Indonesia paska Orde Baru mengalami kemajuan yang signifikan, salahsatunya melalui proses konstitusional, yakni Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung.

Pilkada Langsung yang berlangsung 5 (lima) tahun sekali di seluruh daerah di Indonesia, telah memberikan corak tersendiri dalam perkembangan demokratisasi. Praktik demokrasi di aras lokal telah membuktikan bahwa model demokrasi yang berkembang telah memberikan ruang yang terbuka dan lebih bebas kepada siapa pun untuk mengekspresikan kepentingan politiknya. Saat ini perkembangan politik di aras lokal menjadi jauh lebih kompleks dan menarik untuk dianalisis, karena ciri sistem politik di era ini berbeda dengan sebelumnya, yakni pluralistik, politisasi, de-etatisasi dan demokrasi. Di samping itu, fenomena politik uang *(money politic)*, raja-raja kecil di daerah dan menguatnya politik identitas di daerah. (Machmud, 2013)

Walaupun, proses politik tentunya menjadi tantangan dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang bersifat konstitusional, namun, dinamika sosial politik di Maluku Utara memberikan gambaran rill bahwa masa depan proses demokrasi tentu akan menjadi lebih baik.

Kenyataan tersebut di atas dapat dibuktikan sejak bergulirnya Pilkada Langsung, dengan terpilihnya dua etnis China menjadi Kepala Daerah di dua Kabupaten, yakni Hendrata Thes dan Zulfahri Abdulah Duwila sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula serta Benny Laos yang berpasangan dengan Asrun Padoma terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai. Dengan kata lain, secara politik, masyarakat Maluku Utara telah dewasa dan sangat demokratis, sementara, dari segi sosiologi politik, sesungguhnya masyarakat Maluku Utara adalah masyarakat yang sangat toleransi dan menerima keberagaman. Walaupun, secara sosiologis Maluku Utara merupakan daerah yang multi kultur dan heterogen, namun, dalam kontestasi politik, masyarakat Maluku Utara telah menjadi pemilih yang otonom --- dengan tidak terjadinya konflik di dua kabupaten tersebut paska PILKADA.

Moro-moro ni oli goru-goru duka. Yo mote kore se bao toma alam darajat jou madihutu. Borero goru se sanang matiti kuasa bobato sara. Ino fo maku gise la fo maku gosa laha. Ma sabab ngone na darajat mapuji doro ma loa. Marimoi ngone eli se pelihara kolano ma gunyihi. Toma adat se aturan ngone fo malefo ahu (Epos Kalaodi). Nyanyian sedih dan cinta. Melalui angin dan arus di alam Sang Kuasa. Pesan duka dan gembira para pemimpin. Mari saling menyapa dan berkasih sayang. Karena derajat kita terletak pada kebenaran. Bersatu kita menjaga tempat para pemimpin. Dalam adat dan aturan kita menuliskan kisah kehidupan. Melalui uraian kalimat dari bait puisi berbahasa Tidore ini, menunjukkan pesan kedamaian dan persaudaraan yang menjadi ciri identitas masyarakat Maluku Utara yang mengedepankan persamaan dan bertoleransi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis (Singaribuan,1986), dengan menggunakan landasan teori demokrasi Schumpeter (Suryadi,2007), teori politik identitas Castells (Salim, 2015), Budaya Politik, (Gabriel&Almond, 1984) serta Toleransi (Bagir, 201.7).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Demokrasi dan Politik Identitas Etnis

Demokrasi merupakan suatu fakta sosial, sekarang ini bahkan sampai akhir zaman, kita akan tetap mengagungkan dan memilih warisan kuno tersebut. Secara empirik praktik demokrasi telah berjalan di 30 negara dan telah menunjukkan terjadinya suatu transisi dari sistem politik bukan demokrasi menuju sistem demokratis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan suatu kecenderungan baru dalam perubahan format politik yang dialami oleh sebagian negara-negara di wilayah dunia. (Djafar, 2015).

Lazimnya, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Berarti dalam konteks demokrasi, pemerintah yang berkuasa atau kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat. Oleh karena itu, pelaksana kekuasaan pemerintahan harus mengacu pada kehendak rakyat. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah tersebut dianggap sebagai demokrasi tradisional. Istilah ini digugat karena dianggap tidak dapat lagi menjelaskan kondisi

kehidupan sosial dan politik yang berkembang di masyarakat, karena persoalan politik penguasa pemerintahan yang selalu menggunakan istilah demokrasi --- akan tetapi, dalam praktiknya hanya untuk kepentingan penguasa semata. Misal, Schumpeter menyatakan secara rinci kekurangan dari apa yang diistilahkannya "teori demokrasi klasik --- yang mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah "kehendak rakyat" (*the will of the people*); "sumber dan tujuan kebaikan bersama" (*the commond good*). (Suryadi, 2007)

Memahami apa yang digambarkan Schumpeter tersebut, bila dikaitkan dengan praktik demokrasi di Maluku Utara tentu memberikan ruang perdebatan yang menarik. Betapa tidak, Maluku Utara merupakan satu provinsi yang di dalamnya memiliki 4 (empat) Kerajaan Islam yang memiliki pengaruh dan sejarah sendiri-sendiri. Hingga kini, ke empat kerajaan tersebut masih eksis dengan masing-masing Sultan. Sehingga dapat dibayangkan, sesungguhnya, pemikiran kritis Schumpeter terkait dengan praktik demokrasi klasik terjadi di Maluku Utara. Namun, semua itu berhasil diredam oleh Sultan yang merupakan representasi pemimpin adat, kultural serta agama, walau, acap terseret masuk ke dalam kontestasi politik lokal maupun nasional. Kenyataan tersebut selaras dengan istilah Schumpeter; "menjadi sumber dan tujuan untuk kebaikan bersama".

Dengan empat kerajaan Islam terbesar serta memiliki wilayah kekuasaan yang besar pada masa kejayaannya telah memberikan catatan penting bahwa di wilayah ini sejak dahulu telah memiliki negara yang berdaulat serta mempunyai tradisi dalam pemerintahan yang demokratis. Misalnya, proses Pemilihan Sultan Tidore, sistem pemilihan Sultan dilakukan tidak berdasarkan pada Putra Mahkota, akan tetapi, lewat musyawarah. Hingga kini, dalam praktiknya, tradisi tersebut masih tetap berjalan di Kesultanan Tidore.

Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif, yakni Kabupaten Maluku Utara dengan ibu kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku. Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunanmya melalui pemekaran wilayah provinsi, karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan atau antara wilayah tengah dan tenggara tidak serasi.(Salim, 2015)

Atas dasar itu, pemerintah pusat membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibu kota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan demikian, secara resmi, provinsi ini berdiri pada 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari

Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu yang baru dimekarkan.

Walau setelah menjadi provinsi, kemudian Maluku Utara dimekarkan menjadi enam kabupaten dan dua daerah kota, namun, masih tetap berkelindan dalam permasalahan lama, yakni "kontestasi etnis" sehingga berakibat pada "dominasi dan marjinalisi" di antara etnis dan lapangan politik maupun birokrasi. Hal ini dapat diamati dari beberapa peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 2000-an sampai saat ini. Kegagalan pemilihan Gubernur pada suksesi kepemimpinan provinsi sampai dua kali, adalah merupakan contoh adanya persaingan politik dari para kandidat Gubernur pada tataran kontestasi partai-partai politik yang diinfiltrasi oleh kontestasi etnis. Atau, memang merupakan kontestasi partai-parti politik yang dibelokkan oleh para elit partai dengan menggunakan sentimen etnis untuk memenangkan pertarungan. (Hoemah, 2005).

Pada hakikatnya, setiap momentum politik baik PILKADA maupun PILWAKO (Pemilihan Walikota), faktor politik etnis yang diboncengi oleh perebutan dan pembagian kekuasaan adalah merupakan faktor terbesar yang berimbas dengan meluasnya isu politisasi identitas etnis. Indikatornya, dalam momentum politik, pertarungan identitas etnis selalu berpijak pada latar belakang etnis atau latar belakang daerahnya. Tentunya, hal tersebut dapat dipelajari sejak terbentuknya Provinsi Maluku Utara pada 1999, serta resistensi konflik dalam tiap pemilihan Gubernur Maluku Utara. Mengingat, resistensi konflik terfokus pada sentimen antar etnis yang tentunya bermuara pada perebutan kursi kekuasaan di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, etnis yang dikatakan dominan dalam pertarungan tersebut adalah Makean, Tidore, Ternate, Sanana serta Togale (Tobelo dan Galela), karena etnis tersebut memiliki kesiapan sumber daya manusia yang selalu tampil dalam kontestasi politik di Maluku Utara (Salim, 2015).

Menurut Castells, politik identitas adalah merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas merupakan proses dialog internal dan interaksi sosial. Di sisi lain, identifikasi identitas etnik sebagaimana lazim terjadi pada masyarakat yang multietnik senantiasa tergantung pada situasi dan konteks seseorang berada. Dalam konteks politik di wilayah yang multietnik, terutama pada lembaga seperti DPRD, identifikasi identitas etnik menjadi kemestian. Mengidentifikasi seseorang berdasarkan etnik adalah bagian

dari perilaku dan tindakan komunikasi baik dalam aktifitas dan peran politik maupun dalam kehidupan sosial secara umum, terutama dalam rangka menarik simpati calon pemilih, meningkatkan popularitas serta tujuan politik lainnya (Salim, 2015).

Di sisi lain, faktor perubahan lingkungan juga terjadi di Maluku Utara, sejak masa kesultanan, kemudian memasuki zaman kemerdekaan dengan sistem pemerintahan yang demokratis serta status Maluku Utara yang berubah menjadi Kabupaten, dan pada 1999 menjadi Provinsi Maluku Utara --- telah memaksa elit-elit lokal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Perubahan zaman dan tentunya konstestasi inilah yang diikuti oleh elit-elit lokal yang ada di Maluku Utara untuk menunjukkan eksistensi mereka di tengah-tengah masyarakat. Namun, pada kenyataannya, tidak semua elit lokal dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Banyak di antara mereka yang harus tergerus karena tidak dapat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan arena konstestasi yang berlangsung di Maluku Utara (Abas, 2013).

Konflik Elite dan Penguasaan Sumber Ekonomi

Membaca Maluku Utara sebagai daerah otonomi baru dan sebagai daerah yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, tentunya melahirkan ragam perspektif dengan dinamika sosial politiknya. Apabila dilihat dari prespekti Maluku Utara paska dimekarkan menjadi daerah otonom, maka, ragam persoalan pun lahir. Misalnya, konflik horizontal dan konflik antar gorolongan/kelompok politik dalam kontestasi politik pada PILKADA 2004 dan 2009, serta konflik antar Elit Birokrasi dan Pihak Kesultanan Tidore terkait Ibukota Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Sofifi. Sejatinya, jika dilihat dari perspektif sejarah, pada awalnya wilayah ini merupakan wilayah berdaulat dan cenderung berkonflik antara satu dengan lainnya --- serta empat kerajaan-kerajaan di *Moloku Kie Raha* (empat gunung) yakni, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga membuat bangsa-bangsa asing di antaranya Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda berbondong-bondong datang ke Maluku Utara dengan melakukan memonopoli dagang di wilayah ini selama berabad-abad lamanya.

Bila dirunut dari sejarah, Maluku Utara merupakan provinsi yang cukup kuat dengan dimensi konflik internal (antara kerajaan-kesultanan). Dalam sejarah, Maluku Utara merupakan daerah yang penuh dengan dinamika politik lokal yang bertensi tinggi. Kondisi seperti ini terjadi sejak zaman Kesultanan Ternate di bawah Sutan Babullah dan Kesultanan Tidore di bawah Sultan Nuku. Persaingan dan konflik antar keluarga kesultanan terjadi dengan sengit hingga Maluku Utara terpecah menjadi Ternate dan Tidore sekalipun dipersatukan dalam Empat Pegunungan atau Empat Kesultanan yang beradik-kakak (Moloku Kie Raha). (Qodir, 2016).

Dari empat lembaga kesultanan yang ada, boleh dibilang, hanya kesultanan Ternate yang dapat muncul sebagai sebuah kekuatan untuk mengenalkan budaya Maluku Utara di tingkat nasional. Saat ini, peran Kesultanan Maluku Utara lebih bersifat individu, dalam arti sosok sultan muncul dan menjelma sebagai elit baru Maluku Utara. Tampaknya para sultan sadar bahwa lembaga yang mereka pimpin tidak lagi superioritas seperti dahulu, sehingga, mereka muncul dengan kekuatan basis massa yang dipunyai untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada di Maluku Utara, (Abas, 2013).

Menarik untuk dibicarakan terkait dengan pemekaran Sofifi dalam konteks Pemekaran Maluku Utara secara luas, sebab, saat ini, di Sofifi kantor Gubernur Maluku Utara berada setelah sebelumnya berada di Kota Ternate. Atas gagasan Gubernur Thaib Armayn, Kantor Gubernur saat ini berada di Sofifi (Qodir, 2015). Ironisnya, hingga saat ini, roda pemerintahan paska perpindahan kantor Gubernur ke Sofifi belum berjalan dengan maksimal karena mayoritas para PNS yang bekerja di lingkup Pemerintahan Provinsi dan berjumlah kurang lebih 4000 tinggal di Tidore dan Ternate. Dengan alasan belum ada mes dan transportasi dari Ternate-Tidore ke Sofifi terbilang mahal, maka, efektivitas pelayanan kepada masyarakat hanya berlaku tiga hari kerja, yakni Senin sampai Kamis.

Bertalian dengan yang tersebut di atas, tidak bisa dipungkiri, untuk menjadikan Sofifi daerah yang ramai masih membutuhkan waktu lama. Walau Pemerintah Provinsi menghendaki terjadinya pemekaran Sofifi yang ditolak keras oleh warga Kepulauan Tidore, sehingga menimbulkan terjadinya beberapakali demonstrasi. Pemerintah Provinsi jelas mempunyai agenda agar Sofifi dapat menjadi daerah yang mandiri sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Padahal, saat ini, Sofifi berstatus sebagai ibu kota Kecamatan Oba Utara dan berada dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan. Apa lagi, tidak ada aturan khusus bahwa ibu kota provinsi harus berada di kota atau tempat tersendiri. (Qodir, 2016).

Persoalan yang ada di Maluku Utara tidak semata-mata bertumpu pada letak kantor pemerintahan paska dimekarkan. Ada masalah lain yang juga mendesak untuk dituntaskan, di antaranya mensejahterakan masyarakat serta memperhatikan sumber-sumber perekonomian Maluku Utara yang sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, seperti pengelolaan kayu (Pulau Halmahera), daerah Falabisahaya (Pulau Mangoli), perkebunan pisang di Galela (Pulau Halmahera), sejak kerusuhan 2000, sampai sekarang tidak beroperasi lagi. Akibatnya, 4.500 tenaga kerja perkebunan pisang menganggur, sedang lapangan pekerjaan penggantinya belum tersedia (Qodir, 2016). Begitu juga yang dialami pabrik batu apung (Pulau Tidore) yang tutup sejak konflik pada rentang 2000 yang lalu.

Tidak cukup sampai di situ, perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT. Usaha Mina (BUMN) di (Pulau Bacan), tambang emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Penamboang (Kao dan Maifut (Pulau Halmahera), serta tambang nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pakal juga tidak terlepas dengan konflik antar warga masyarakat dengan pengusaha. Akibatnya sudah bisa kita pahami bersama, ledakan tenaga kerja pun bakal menjadi persoalan serius di Maluku Utara. Mengingat mereka bukan semata-mata tenaga kerja yang berasal dari Maluku Utara, akan tetapi, banyak juga tenaga kerja yang datang dari Pulau Jawa, Bugis dan Buton. Kenyataan ini merupakan tantangan lain yang bakal dihadapi oleh masyarakat Maluku Utara dalam pesaingan ketenagakerjaan, (Qodir, 2016).

Budaya Politik dan Pluralisme Politik Masyarakat

Sebagai provinsi baru, Maluku Utara mempunyai corak budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda antar satu daerah dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dalam sosial-kultural masyarakat yang ada di Maluku Utara. Daerah yang memiliki 28 etnis dan 29 bahasa ini terbilang unik dan memiliki identitas tersendiri. Hal ini tampak dalam perbedaan *logat*, misalnya antar masyarakat Tomalou dan Gurabati atau masyarakat Goto dan Cobode memiliki dialek yang berbeda walau kesemuanya menggunakan bahasa yang sama sebagai etnis Tidore. Keunikan yang menjadi ciri identitas masyarakat Maluku Utara tentunya dapat menggambarkan bahwa sebagian wilayahnya, secara geografis adalah laut.

Walau begitu, dalam kontestasi politik, budaya politik masyarakat Maluku Utara sangat dinamis. Salah satunya, setiap kontestasi PILKADA, maka, persinggungan etnis pasti mengemuka dalam konteks partispasi politik masyarakat. Menurut Almond dan Verba, kebudayaan politik suatu bangsa adalah merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu (Almond dan Verba,1984).

Bertalian dengan apa yang dipaparkan oleh Almond dan Verba, dapat dipahami, terjadinya politik identitas etnis dalam praktik politik di Maluku Utara menunjukkan adanya pertarungan antar para aktor politik serta elit dalam struktur untuk melegitimasi isu etnis demi mendorong pola-pola orientasi khusus demi mencapai tujuan politiknya. Oleh karena itu, persinggungan antar kelompok etnis dalam pertarungan politik ketika proses PILKADA bergulir selalu mencuat ke permuakaan secara terbuka. Konstruksi semangat etnisitas dalam politik di Maluku Utara mencapai klimaks tatkala PILKADA langsung menjadi pertarungan kepentingan secara terbuka untuk para aktor ataupun masyarakat yang berkompetisi dalam arena politik secara demokratis. Akibatnya sudah bisa dipahami, ruang konflik pun terbuka. Ironisnya, kenyataan ini selalu berulang dalam setiap momentum politik.

Namun, persinggungan masyarakat yang melegitimasi etnis sebagai modal politik yang dinilai menjual dalam sejarah PILKADA, ternyata, tidak selamanya berakhir dengan konflik antar etnis. Sejatinya, yang terjadi pada 2004 dan 2009 hanya merupakan persinggungan antara para kelompok kedua kandidat Calon Gubernur, Thaib Armayn dan Abdul Gafur. Secara kebetulan, dalam polariasi etnis, keduanya berasal dari etnis yang berbeda. Konflik yang diletupkan oleh aktor-aktor politik bernuansa etnis dan golongan tidak lagi mengemuka, seiring dengan kedua figur ini tidak lagi bertarung dalam kontetasi politik di Maluku Utara.

Dinamika politik Maluku Utara yang berkembang dari tahun ke tahun menunjukkan perubahan ke arah demokrasi yang lebih baik. Sebagai daerah yang pluralis, walau sejak 1999-2000 Maluku Utara ditetap oleh Pemerintah Pusat sebagai daerah darurat sipil dan mendapat label daerah rawan konflik, kini terjawab tuntas. Praktik demokrasi Maluku Utara, semenjak bergulirnya Pilkada Langsung telah membuktikan dengan terpilihnya etnis China menjadi dua Kepala Daerah di dua Kabupaten, yakni Hendrata Thes dan Zulfahri Abdulah Duwila sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula serta Benny Laos yang berpasangan dengan Asrun Padoma terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai.

Secara politik, kenyataan ini membuktikan bahwa masyarakat Maluku Utara telah dewasa dan sangat demokratis, sementara, secara sosiologi politik sesungguhnya masyarakat sangat toleransi dan menerima keberagaman.

Salah satu gambaran konkret masyarakat Morotai menerima Benny Laos, menurut Sukri Ali; *Pertama*. tidak terlepas dari situasi di masa lalu. Sejak konflik horizontal pada 1999-2000 di Morotai, akhirnya, hingga saat ini menjadi beban sejarah bagi masyarakat. Secara psikologis semacam ada rekonsiliasi yang belum selesai dari konflik tersebut hingga bersifat laten. *Kedua*, pada kepemimpinan Rusli Sibua (Bupati periode 2001-2016), ada proses politik yang *stagnan* karena tidak memberikan porsi politik yang besar terhadap wakilnya, Weni R. Paraisu yang beragama Kristen. Hal tersebut cukup mengganggu psikologi masyarakat Kristen Morotai. Akibat implikasi dari kebijakan politik yang dinilai tidak proposional dan mewakili aspirasi masyarakat, maka, kehadiran Beny Laos dianggap sebagai simbol pembaharu bagi masyarakat Kristen di Morotai. Oleh sebab itu, pada PILAKADA Morotai, kunci kemenangan Beny Laos di kantong-kantong Kristen mencapai 80%-100%. *Ketiga*, Beny Laos dipandang sebagai kekuatan politik yang mewakili komunitas Kristen. Kesimpulannya, politik riil di Morotai adalah mengkonstruksi isue agama. Oleh sebab itu, selalu ada pendeta yang mendampingi Beny Laos pada setiap kampanyenya. Begitu juga pendukungnya dari komunitas muslim karena wakil yang mendampingi Beny adalah muslim, serta, orientasi dukungan masyarakat bersifat pragmatis salah satunya karena uang. (Wawancara Sukri Ali, dilakukan menggunakan telepon pada hari Minggu, tgl, 8 April 2018).

Dalam masyarakat Maluku Utara yang pluralistis, kekuasaan, penentuan keputusan dan akses kekuasaan lebih tersebar. Contoh kelompok-kelompok dan situasi-situasi hal mana pluralisme adalah penting ialah: perusahaan, lembaga-lembaga politik dan ekonomi, dan forum-forum ilmiah.

Pluralisme yang dipahami dari maksud di atas tentunya tidak terpaku pada upaya menyatukan semua orang atau kelompok dalam suatu paham yang sama. Namun, pluralisme menerima dan mempertahankan perbedaan, yang kemudian disyaratkan bukan untuk menghilangkan identitas seseorang atau kelompok demi mengejar persatuan atau persamaan. Sehingga, pluralisme menjadi suatu bentuk penerimaan hak-hak orang lain, hal mana, hak seseorang untuk menyongsong masa depan yang ingin dijalani dan hak mereka untuk berbeda. Premis berikutnya ialah, pengakuan terhadap perbedaan, keberagaman tradisi dan agama atau budaya sehingga akan menjadi tantangan berat bagi kohesi sosial atau suatu tatanan pemerintahan, dapat menjadi peluang demi berkembangnya budaya sipil dan politik yang hidup dan beragam. Oleh karena itu, pluralisme dimaknai secara beragam, misal, jika fokusnya terhadap keberagaman agama, maka, pijakannya pada tata kelola masyarakat yang majemuk.(Bagir, 2011).

Berkaitan dengan kajian teologis, tidak semua penganut agama sependapat mengatakan kebenaran lain di luar dari agama yang diyakininya. Dalam hal ini, Lochhead mengatakan bahwa di dalam setiap tradisi keagamaan terkandung benih-benih ideologi atau teologi yang bersifat *isolasonis* (tiap agama hidup dan berkembang dalam lembaga agamanya sendiri), konfrontasi, yang berbeda ialah pesaing yang perlu dicurigai dan bahkan kebencian terhadap yang lain dan yang berbeda adalah musuh yang harus ditaklukan. Berbeda dengan Lochhead, Yudi Latif mengatakan bahwa, fanatisme lahir dari ketidakpercayaan diri untuk menghadapi perbedaan pikiran, ekspresi kehidupan, kemudian menetapkan segala hal-ikhwal yang suci dianggap steril, tidak pernah terkontaminasi dan murni. Menurut Latif, pada akhirnya fanatisme merendahkan kemuliaan anak cucu Adam, berupa pencapaian kebenaran dan martabat manusia. Latif menyebut segenap umat manusia dengan anak cucu Adam, bukan tanpa maksud, malah merupakan hal penting dan penuh makna yaitu menjadikan segenap umat manusia menyadari bahwa kita adalah keturunan dari nenek moyang yang sama, (Shofan, 2008).

Paparan di atas merupakan gambaran menarik tentang dinamika sosial politik di Maluku Utara yang pada perkembangannya memberikan ruang dan kesempatan kepada setiap individu untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik melalu PILKADA, sekaligus pembelajaran politik kepada wilayah lain di Indonesia bahwa Maluku Utara sebagai daerah yang mayoritas Islam dan memiliki Kesultanan Islam yang tertua di Indonesia, telah mempraktikkan cita-cita Pancasila dengan mengimplementasikan sila ke Lima, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kedua kepala daerah dari etnis China bukan

etnis asli Maluku Utara terpilih memimpin dua Kabupaten secara kontitusional merupakan potret keberhasilan praktik demokrasi di Maluku Utara.

SIMPULAN

Pada hakikatnya, dinamika sosial politik di Maluku Utara sama dengan daerah lain di Indonesia. Sebagai daerah yang usia pemekarannya sama seperti Banten dan Bangka Belitung, sudah barang tentu, Maluku Utara menyisakan sederet persoalan; ketimpangan ekonomi, kemiskinan, insfrastruktur dan korupsi menjadi wacana yang terus mengemuka dalam setiap kampanye politik atau isu yang terus dikonstruksi oleh penggiat gerakan sosial. Sebagai daerah yang multi etnis dan budayanya, maka, pada setiap ajang kontestasi politik sarat dengan konflik serta intrik antar kelompok kepentingan maupun elit birokrasi maupun elit partai politik. Walau konstruksi isu etnis dan agama yang memiliki nilai jual selalu menguat di dalam kontestasi politik, pada sisi lain, kedewasaan masyarakat dalam partisipasi politik di Maluku Utara memberikan harapan baru dengan mempraktikkan budaya politik yang santun dan bermartabat serta mengedepankan nalar politik yang mengahargai perbedaan ras dan golongan.

Dengan sikap toleran dan menghargai perbedaan tersebut menyisihkan *stereotipe* bahwa Maluku Utara adalah daerah rawan konflik dan dalam tiap perhelatan politik selalu menyisakan konflik komunal. Akan tetapi, sejak 2013 hingga kini semua tidak terjadi. Dengan kampanye yang lebih susbstantif, khususnya lebih menyoroti aspek pembangunan sumber daya manusia dan akses terhadap sumber ekonomi yang sejauh ini belum menjadi isu penting di Maluku Utara, ternyata, jauh lebih penting ketimbang mengusung isu-isu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel A-Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Penerjemaah: Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara.

Bagir, Zainal Abdil. dkk, 2011. *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia.* Yogyakarta: Center for Religion and Cross-cultural Studies Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Penerbit Mizan

Djafar, T.B. Massa. 2015. *Krisis Politik dan Prosesi Demokratisasi. Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi.* Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Hoemah, Darsies. 2005. *Otonomi Daerah dan Kontetstasi Etnik di Maluku Utara.* Dalam Potret Gelisah Negeri Pinggiran. Perspektif Kritis Atas Maluku Utara. Editor: M. Rahmi Husen dan Herman Oesman. Ternate: Pustaka FoSHAL

Machmu, Imron D. 2013. *Kelompok etnis dalam pelukan elit lokal*. Ternate: UMMU PRESS.

Qodir, Zuly. 2016. *Teori dan Praktik Politik Di Indonesia. Memahami Partai, Pemilu dan Kejahatan Politik Paska Orde Baru*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Rusdi, J. Abbas, 2013. *Demokrasi di Aras lokal. Praktik Politik Elit Lokal di Maluku Utara.* Yogyakarta: Cerahmedia.

Shofan, Moh. 2008. *Menuju Pluralisme Global dan Menimbang Masa Depan Pluralisme*, dalam Ali Usman, *Menegakkan Pluralisme, Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, Yogyakarta: LSAF dan Ar-Ruzz Media

Salim, Kamaruddin. 2015. *Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Langsung. Studi Kasus Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013.* Jakaarta: Sekolah Paskasarjana.Universitas Nasional

_____2015. *Politik Identitas di Maluku Utara*. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan. VOL. 11 No. 02. 2015 1 6 6 8 Jakarta: Universitas Nasional

Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, Yogyakarta: Ircisod

Wawancara Via telepon dengan Sukri Ali Ketua Program Studi Adminsitari Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasifik Morotai pada Minggu, 8 April 2018. Pukul 13.00. WIB

TENTANG PENULIS

Kamaruddin Salim, menempuh sarjana strata 1 di Program Studi Sosiologi Universitas Nasional dan magister strata 2 di Ilmu Politik Universitas Nasional. Saat ini Kamaruddin merupakan dosen tetap di Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Nasional. Aktif menulis jurnal, artikel dan buku. Buku terbarunya adalah Sosiologi Politik (2018).